

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussalam, H.R., 2005, *Hukum Kepolisian sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, cet. Kedua, PTIK Press, Jakarta.
- Al Marsudi, Subadi, 2003, *Pancasila dan UUD'45 dalam Paradigma Reformasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ali, Mahrus dan Syarif Nurhidayat, 2011, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (In Court System dan Out Court System)*, Gramata Publishing, Jakarta.
- Amrullah, M. Arif, 2003, *Politik Hukum Pidana Dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, cet. Pertama, Bayumedia Publishing, Malang.
- Arief, Barda Nawawi, 2011, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- , 2015, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang.
- Atmadja, I Dewa Gede dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori Teori Hukum*, Setara Press, Malang.
- Atmasasmita, Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana “Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme”*, Binacipta, Bandung.
- Awaluddin, Hamid, 2012, *HAM Politik Hukum, & Kemunafikan Internasional*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Bruggink, J.J.H., 2015, *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-pengertian Dasar dalam Teori Hukum (Rechtreflecties: Grondbegrippen Uit De Rechttheorie)*, cet. IV, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Buaton, Tiarsen, 2020, *Peradilan Militer Dalam Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok.

- Chazawi, Adami, 2019, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*, cet.4, PT Rajagrafindo Persada, Depok
- Daeng Matutu, Mustamin, Abdul Latif dan Hikmawati Mustamin, 2004, *Mat, Delegasi, Attribusi dan Implementasinya di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Diantha, I Made Pasek, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, Jakarta.
- Efendi, A. Masyhur dan Taufani Sukmana Evandri, 2007, *HAM Dalam Dimensi/ Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan
- Friedman, Lawrence M., 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York
- _____, 1984, *American Law: An Introduction*, First Edition, W.W. Norton & Company, London.
- Friedmann, W., 1993, *Teori & Filsafat Hukum*, Ed. 1, cet. 2, diterjemahkan oleh Muhammad Arifin. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Friedrich, Carl Joachim, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- Fuady, Munir, 2009. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama. Bandung.
- Gautama, Sudargo, 1983, *Pengertian Tenlang Negara Hukum*, Alumni, Bandung.
- Gunawan, Yopi dan Kristian, 2015, *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Hukum Negara Pancasila*, Refika Aditama, Bandung.
- Hakim, Lukman, 2019, *Asas-asas Hukum Pidana Bahan Ajar bagi Mahasiswa*, Deepublish (CV Budi Utama), Yogyakarta, hlm 18. (Online).
<http://repository.ubharajaya.ac.id/3420/1/Buku%20Ajar%20Asas-Asas%20Hukum%20Pidana.pdf> (diakses 13 Januari 2024).

- Halim, Hamzah dan Saleh, H.S. Muh. Ikhsan, 2009, *Persekongkolan Rezim Politik Lokal Studi atas Relasi Antara Eksekutif dan Legislatif*, cet Pertama, Disertasi yang diangkat menjadi buku, Pukap-Indonesia, Makassar.
- Hamzah, Andi, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- H.S, Salim. dan Nurbani, Erlies Septiana, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, cet. 2, Raja Grafindo Pertsada, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M., 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya.
- _____, 1996, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia*. Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo. Media Pratama. Jakarta.
- Hamid, H. Abdul, 2016, *Teori Negara Hukum Modern*, Pustaka Setia, cet. 1, Bandung.
- Huijbers, Theo, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, cet VIII, Kanisius, Yogyakarta.
- Ibrahim Harmaily dan Moh. Kusnardi, 1988, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta.
- Irwansyah, 2020, *Kajian Ilmu Hukum*, cet-1, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- _____, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Ismangil, Wagino, 1984, *Pendekatan Sistem Dalam Manajemen Organisasi*, cet. 1, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta.
- Karen, Lebacqz, *Six Theories of Justice*, diterjemahkan oleh Yudi Santoso dengan judul *Teori-Teori Keadilan: Analisis Kritis terhadap Pemikiran J.S. Mill, John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda*, Nusa Media, Bandung.

- Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, 2009, *Petunjuk Administrasi Oditurat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia.
- _____, 2016, *Disiplin Prajurit TNI*, Badan Pembinaan Hukum TNI, Jakarta.
- _____, 2021, *Undang Undang Peradilan Militer, KUHP dan KUHPM*, Badan Pembinaan Hukum TNI, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, 2013, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, cetakan ke-II, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 9, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moh. Kusnardi dan Ibrahim, Harmaily, 1988, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta.
- Muhammad, Rusli, 2010, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung.
- _____, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, cet- II, Badan Penerbit Universits Diponegoro, Semarang
- _____, 1995, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mulyadi, Lilik, 2002, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, cet.2, Citra Aditya Bakti, Bandung
- P.H. Agustunus., 2019, *Kapita Selektta Hukum Pidana Militer*, cet. 1, Rajawali Pers, Depok.
- Rahardjo, Satjipto, 1983, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- _____, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- _____, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- _____, 2006, *Ilmu Hukum*, cet. 6, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahmad, Riadi Asra, 2019, *Hukum Acara Pidana*, cet. 1, Rajawali Pers, Depok, hlm. 70. (Online),
<https://repository.uir.ac.id/1839/1/HUKUM%20ACARA%20PIDAN%20EDISI%20I.pdf> (diakses 14 April 2023)
- Rawls, Jhon, 1973, *A Theory of Justice*, Oxford University Press, London.
- _____, 2019, *Teori Keadilan (A Theory of Justice)*, cet. 3, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Reksodiputro, Mardjono, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum, Fakutlas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- _____, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, cet.2. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta.
- _____, 2007, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan karangan Buku Kelima*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- Ruslan, Achmad, 2023, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, cet. Pertama, Rajawali Pers, Depok,
- Safa'at, Muhammad Ali, *Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, dan John Rawls)*, (online)
<http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/keadilan.pdf> (diakses 7 Agustus 2023)
- Salam, Moch. Faisal, 2002. *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*, cet. 2, Mandar Maju, Bandung.
- _____, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, cet. 1. Mandar Maju, Bandung.
- Salman. S, H.R. Otje dan Susanto, Anthon F., 2007, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, cet. ketiga, PT. Refika Aditama, Bandung.

- Santoso, Agus, 2015, *Hukum, Moral, & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, cet Ke 3, Prenadamedia Grup, Jakarta.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, 2004, *Kriminologi*, cet. 4, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sianturi, S.R, 2010, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, cet. 3, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Jakarta.
- _____, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Babinkum TNI, Jakarta.
- Soegiri. Dkk, 1976, *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia*, Indra Djaja, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Penegakan Hukum*, cet. I, Binacipta, Bandung.
- _____, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2015, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, cet ke-17, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemitro, Ronny H., 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta.
- Sunarso, H. Siswanto, 2005, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Suteki dan Taufani, Galang, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, cet. 2, Rajawali Pers, Depok.
- Tambunan, A.S.S., 2013, *Hukum Militer Indonesia Suatu Pengantar*, cet. II, Pusat Studi Hukum Militer Sekolah Tinggi Hukum Militer "AHM-PTHM", Jakarta.
- Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, 2002, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- _____, 2002, *Penegakan Hukum Dalam Terang Etika*, cet ke I, Genta Publishing, Yogyakarta

- Thaib, Dahlan, 1996. *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia*, Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo, Media Pratama. Jakarta.
- Thalib, Abdul Rasyid, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Implikasi Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Wahjono, Padmo, 1982, *Konsep Yuridis Negara Hukum Republik Indonesia*, Rajawali, Jakarta.
- Wignjosoebroto, Soetyo, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM-HUMA, Jakarta.
- Yanto, Oksidella, 2020, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, cet. 1, Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- Yudianto, Otto, 2015, *Kebijakan Formulatif Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Rangkaian Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Menuju Insan Cemerlang, Surabaya.

Jurnal

- Ali, Mahrus, *Mahkamah Konstitusi dan Penafsiran Hukum Progresif*, dalam Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 1, Februari 2010.
- Anshari, Natsri, 2014, *Perubahan Hukum Disiplin Militer: Disiplin versus Keadilan*, Jurnal Hukum Militer, Vol. 2. No. 1. (diakses 21 Desember 2021).
- Ansori, Lutfi, 2017, *Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif*, (Online), Jurnal Yuridis, Vol. 4 No. 2. <https://media.neliti.com/media/publications/282166-reformasi-penegakan-hukum-perspektif-huk-068a307f.pdf>. (diakses 22 Desember 2021).
- C., Anwar, 2010, *Problematika mewujudkan keadilan substantif dalam penegakan hukum di Indonesia* (Online), Jurnal Konstitusi Puskasi FH Universitas Widyagama Malang, Vol. III, No. 1, <https://media.neliti.com>, (diakses 1 Juni 2021).

- Fadilah, F, 2012, *Refleksi Terhadap Makna Keadilan Sebagai Fairness Menurut Jhon Rawls*, (online), <https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/kyberman/article/> (diakses 9 Agustus 2023)
- Fitriana, Mia Kusuma, 2014, *Yurisdiksi Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Umum Yang Melibatkan Militer Dan Sipil (Online)*, Arena Hukum, Volume.7 No.2, hlm.277. https://www.researchgate.net/publication/306041619_yurisdiksi_pengadilan_terhadap_tindak_pidana_umum_yang_melibatkan_militer_dan_sipil, (diakses 21 Desember 2021).
- Lex Privatum, Vol. V No.10, 2017, hlm.23, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/1874> (diakses 27 Desember 2021).
- Lubis, Muhammad Hykna Kurniawan Dkk 4 April 2018, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Militer*, (Online) USU Law Journal, Volume.5 No.4, 2017, hlm.30, <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/viewFile/19497/8236>. (diakses 27 Desember 2021).
- Makarewa, Irene Trinita, *Analisis Penghentian Penyidikan Dan Penuntutan Berdasarkan KUHP, Lex Crimen Vol. X/No. 9/Ags/2021*, (Online), <http://ejournal.unsrat.ac.id> (diakses 23 Maret 2023).
- Poli, Rima Katherina, 2017, *Pertanggungjawaban Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Gratifikasi*, (Online).
- Suliantoro, B. Wibowo, 2007, *Dinamika Arah Kepastian Hukum Di Tengah Transformasi Sosial Budaya Dalam Perspektif Pemikiran Mazhab Sociological Jurisprudence*, (Online), Jurnal Filsafat Universitas Gajah Mada, Vol. 17 April 2007 <https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/download/23192/15289> (diakses 12 September 2023)
- Sulistiriyanto, Haryono, 2011, *"Pertanggungjawaban Pidana Anggota militer TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi"*, Jurnal Perspektif, Vol. XVI, No.2 (April 2011).

Supriyadi, 2008, *Penerapan Pidana Pemecatan Terhadap Tentara Nasional Indonesia Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, (Online), Mimbar Hukum, Volume. 20 No.2, 2008, hlm. 297, <https://www.neliti.com/id/publications/40654/penerapan-pidana-pemecatan-terhadap-anggota-tentara-nasional-indonesia-sebagai-p>, (diakses 21 Desember 2021).

Wahyudi, Misran, 2015, *Analisis Independensi Oditur Militer Dalam Melaksanakan Fungsinya Di Oditurat Militer III-14 Denpasar Dengan Berlakunya Kebijakan Rencana Tuntutan* (Online), Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume.4 No.3, hlm.518. <https://www.neliti.com/id/putblication/44167/analisis-independensi-oditur-militer-dalam>, (diakses 21 Desember 2021).

Makalah dan Artikel

Adryanto, S. Dian, ed., 2021, *Memahami 7 Tugas Polisi Militer untuk Penegakan Hukum kepada Aparat*, <https://nasional.tempo.co/amp/1517961/memahami-7-tugas-polisi-militer-untuk-penegakan-hukum-kepada-aparat/full&view=ok>, (diakses 24 November 2021).

Agustian, Eri, *Sejarah Teori Sistem*, <https://id.scribd.com.../SEJARAH-TEORI-SISTEM-pdf-pdf> (diakses 2 September 2024)

Asshiddiqie, Jimly, (s.a.), *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, (Online), <http://jimly.com/makalah/namafile/57/konsepnegarahukumindonesia.pdf>, (diakses 16 Desember 2021).

Asshiddiqie, Jimly, (s.a.), *Penegakan Hukum*, (Online), http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf (diakses 14 Desember 2021).

Binus University School of Accounting, *Apakah Pengertian Dari Sebuah Sistem*, <https://accounting.binus.ac.id/2015/09/22/apakah-pengertian-dari-sebuah-sistem/> (diakses 20 Juni 2023).

Laily, Iftitah Nurul, 2022, *Delegasi adalah Pelimpahan Kewenangan, Pahami Penjelasannya*, (Online) <https://katadata.co.id/amp/safrezi/berita/61cb2b41b820/delegasi->

[adalah-pelimpahan-kewenangan-pahami-penjelasan-nya](#). (diakses 5 April 2023).

Mataram, G.P.H. Haryo, 1997, *Hukum Humaniter : Hubungan Dan Kaitannya Dengan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional Dan Hukum Perlucutan Senjata (Pidato Pengukuhan Diucapkan Pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti Di Jakarta, 2 Oktober 1997)*

Mulachela, Husen, *Sistem Adalah Suatu Kesatuan, Berikut Teori dan Cirinya*, (Online), <https://katadata.co.id/berita/nasional/61f37503ef773/> (diakses 5 September 2024)

Munaf, Yusri, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyah Tujuh Publishing, Pekanbaru Riau, hlm. 3. (On line). <https://jdih.situbondokab.go.id>. (diakses 30 Juni 2023).

Munawaroh, Nafiatul, 2023, *Arti Pro Justitia an Contoh Penerapannya*, (Online), <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pro-justitia> (diakses 9 Juli 2023).

Pengadilan Militer II-09 Bandung, 2020, *Sejarah Pengadilan Militer di Indonesia* (Online), <https://dilmil-bung.go.id/sejarah/>, (diakses 8 Januari 2022).

Pengadilan Negeri Jantho Kelas II, 2022, *Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, Aceh Besar. <https://www.pn-jantho.go.id/index.php/2022/7/05/alat-bukti-dalam-perkara-pidana-menurut-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana-kuhap/> (diakses tanggal 5 Juni 2023)

Pengadilan Negeri Ponorogo, 2023, <https://pn-ponorogo.go.id/joomla/index.php/tentang-kami/> (diakses 24 Juni 2023)

Polisi Militer, https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi_Militer, (diakses 24 November 2021).

Pramesti, Tri Jata Ayu, *Apakah Penghentian Penyidikan Harus dengan Penetapan Tersangka Terlebih Dulu*, (Online), [Apakah Penghentian Penyidikan Harus dengan Penetapan Tersangka Terlebih Dulu - Klinik Hukumonline](#), (diakses 23 Maret 2023).

- Profil Pengadilan Negeri Ponorogo, 2023, <https://pn-ponorogo.go.id/joomla/index.php/tentang-kami/> (diakses 24 Juni 2023).
- Purnama, Kakak Indra, 2022, *Pro Justitia, Apa Artinya dalam hukum*, (Online), Berita Fakta Tempo.co. <https://nasional.tempo.co/amp/1631982/pro-justitia-apa-artinya-dalam-hukum>. (diakses 9 Juli 2023).
- Sagala, Parluhutan dan Ferdian, Fredy, 13 April 2018, *Yurisdiksi Peradilan Militer Dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Online), <http://www.dilmiltama.go.id/home/ejournal/> Yurisdiksi Peradilan Militer.pdf., (diakses 20 Desember 2021).
- Sasmito, Joko, 2015, “*Mewujudkan Kemandirian Hakim Untuk Menegakkan Hukum Dan Keadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer*”, Perspektif, Vol. XX No.1.
- Sisma, Annisa Fianni, 2023, *Memahami Teori Social Engineering Roscoe Pound*, (Online), <https://katadata.co.id/amp/agung/berita/63dcbf3773247/memahami-teori-social-engineering-roscoe-pound>. (diakses 11 Oktober 2023)
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Satuan Reserse Kriminal Polres Mataram, <https://ntb.polri.go.id/wp-content/uploads/sites/3/2017/03/sop-penghentian-penyidikan-sat-reskrim-p0lres-mataram-tahun-2016.pdf> , diakses (12 Mei 2023).
- Susilowati, W.M. Herry, 2000, *Kritik Terhadap Aliran Sociological Jurisprudence Eugen Ehrlick*, (Online). <https://www.neliti.com/id/publications/524464/kritik-terhadap-aliran-sociological-jurisprudence-eugen-ehrlich> (diakses 12 September 2023)
- Sulistyo, Prayogi Dwi, Dibalik Terbitnya Putusan Penghentian Penyidikan BLBI, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/04/08/di-balik-terbitnya-penghentian-penyidikan-blbi/> (diakses 15 Juni 2023)
- Supriatna, Iur Liona N, dan ri Marpaung & Partners, *Ulasan Hukum Mengenai Alasan Dan Dasar Hukum Penghentian Penyidikan*, (Online), (Ulasan Hukum Mengenai Alasan Dan Dasar Hukum

Penghentian Penyidikan – Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – ri Marpaung, S.H. & Partners – “Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners” (lawyersclubs.com)) (diakses 23 Maret 2023)

Wikipedia, (s.a), Polisi Militer, https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi_militer, (diakses 24 November 2021).

Disertasi

Ashari, Yulian, 2017, *Kompetensi Peradilan Militer dalam Penanganan Tindak Pidana Umum yang Dilakukan oleh Prajurit TNI di Indonesia*, Disertasi tidak diterbitkan, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Edy, Slamet Sarwo, 2016, *Independensi Sistem Peradilan Militer Di Indonesia (Studi Tentang Struktur Peradilan Militer)* (Online), Disertasi tidak diterbitkan, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. <https://oaji.net/articles/2017/3905-1505469102.pdf> (diakses 11 Desember 2021).

Hoeda, Syamsol, 2020, *Pidana Pemecatan Dari Dinas Militer Terhadap Prajurit Penyalahgunaan Narkoba*, Disertasi tidak diterbitkan, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jember, Jember.

Kusuma, Eddie, 2009, *Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS Direktorat Jenderal Pajak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Disertasi tidak diterbitkan, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.

Nevi Yuliani, Adis, 2021, *Tindak Pidana Insubordinasi Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia*, Disertasi tidak diterbitkan, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/ideal.html> (diakses 12 Juli 2023).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI Daring, Badan Pengembangan dan Bahasa Pembinaan,
<http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kepentingan> (diakses 27 Desember 2023).

Peraturan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 7 Tahun 1946 tentang Pembentukan Pengadilan Tentara.

Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 8 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara.

Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 39 Tahun 1947 tentang Hukum Pidana Militer.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1950 tentang menetapkan Undang-Undang Darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Pengadilan Ketentaraan (Undang-undang Darurat Nr. 16 tahun 1950), sebagai Undang-Undang Federal.

Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 6 Tahun 1950 tentang menetapkan “Undang-undang Darurat Tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara” (Undang-Undang Darurat Nr. 17 tahun 1950), sebagai Undang-undang Federal.

Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1958 dengan sebutan Undang-undang Nomor 1 DRT Tahun 1958, yang mengubah Bab II tentang Pemeriksaan Permulaan.

Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, dan DPRD.

Undang-undang Republik Indonesia, Nomor, 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia, Nomor, 25 Tahun 2014, tentang Hukum Disiplin Militer.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/171/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Persyaratan Pengangkatan, Pemberhentian Penyidik dan Penyidik Pembantu Polisi Militer.

Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1366/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Oditurat dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1383/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Penyidikan Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/15/VII/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Penunjukan Perwira Penyerah Perkara di Lingkungan Angkatan Darat.

Lampiran Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 58 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tugas Polisi Militer Komando Daerah Militer.

Lampiran Keputusan Kasad Nomor Kep/629/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kewenangan Papera Dan Ankum di lingkungan TNI AD.

Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/467/VI/2016 tanggal 31 Juni 2016 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan Satuan TNI AD.

Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor KEP/447/VI/2017 Petunjuk Teknis tentang Penyelesaian perkara tindak pidana di lingkungan TNI AD

Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/542/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Sementara dari Jabatan (*Schorsing*).

Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 39 Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018.

Hasil Wawancara

Wawancara dengan Komandan Polisi Militer Kodam XIV/Hsn (Andi Suci)

Wawancara dengan Kepala Hukum Kodam XIV/Hsn (Bahrin Taslim).

Wawancara dengan Amiruddin.